

PENGARUH MODAL USAHA LEMBAGA KEUANGAN MIKRO TERHADAP VOLUME USAHA KECIL DI KABUPATEN ACEH BESAR

Murtala

Program Studi Ekonomi Pembangunan
Fakultas Ekonomi Universitas Malikussaleh

Abstrak

Tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh modal usaha Lembaga Keuangan Mikro terhadap volume usaha kecil di Aceh Besar. Penelitian ini dilakukan di kabupaten Aceh Besar, variabel dalam penelitian ini dibatasi hanya variabel jumlah dana yang disalurkan oleh lembaga keuangan mikro kepada usaha kecil dan mikro dan variabel total penerimaan untuk semua usaha kecil dan mikro yang terdapat di kabupaten Aceh Besar dari tahun 2000-2006. Dari hasil penelitian diperoleh perkembangan Lembaga Keuangan Mikro di Kabupaten Aceh Besar dari tahun 2000-2006 menunjukkan adanya peningkatan yang signifikan. Jumlah Lembaga keuangan Mikro dari tahun 2000 sebanyak 2 unit kemudian bertambah menjadi 3 unit pada tahun 2001 dan 2002, sampai tahun 2006 jumlah Lembaga keuangan Mikro menjadi 8 unit. Dari hasil penelitian diperoleh koefisien determinan (R^2) bernilai 0,881 atau 88,1 persen menunjukkan bahwa determinan variabel modal usaha untuk pengembangan usaha kecil berpengaruh terhadap volume usaha kecil di Kabupaten Aceh Besar sebesar 88,1 persen, sedangkan sisanya sebesar 11,9 persen adalah faktor-faktor lain yang tidak dimasukkan dalam penelitian ini yang mempengaruhi volume usaha kecil di Kabupaten Aceh Besar. Diharapkan kepada pengusaha kecil dan menengah di Kabupaten Aceh Besar dapat terus meningkatkan kinerjanya, yang pada akhirnya dapat meningkatkan volume usaha, hal ini dapat dilakukan dengan menambah modal, dan strategi pemasaran untuk menarik minat beli dari konsumen.

Kata Kunci: Modal usaha, lembaga keuangan mikro, volume usaha kecil

PENDAHULUAN

Di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam, sektor UMKM harus lebih diperhatikan mengingat masih banyak masyarakat Aceh khususnya masyarakat di pedesaan yang belum bisa mengakses jasa perbankan, untuk itu sektor UMKM sangat perlu untuk terus dikembangkan. Pentingnya pengembangan sektor UMKM di Aceh terutama pasca tsunami. Di mana akibat terjadinya bencana gempa bumi dan gelombang tsunami pada tanggal 26 Desember 2004 telah mengakibatkan sebanyak 20,88 persen (5.176 unit) sektor UMKM hancur, sehingga menyebabkan 170 ribu orang kehilangan pekerjaan. Angka yang sebenarnya mungkin lebih tinggi karena bencana ini menimpa wilayah Kotamadya Banda Aceh. Pasca bencana alam tersebut, kegiatan produksi

beralih pada sektor UMKM. Hal ini dikarenakan sektor UMKM mampu bertahan dalam setiap kondisi apapun. Di mana data BPS menunjukkan bahwa besaran Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) yang diciptakan UMKM di Kota Banda Aceh dari tahun 2000-2005 mengalami kenaikan yang sangat berarti. Pada tahun 2001, PDRB Kota Banda Aceh mencapai Rp 1.318.011,26 juta, naik ketimbang tahun 2000 yang hanya Rp 1.216.609,86 juta. PDRB ini terus meningkat menjadi Rp 1.493.057,77 juta di tahun 2002, kemudian di tahun 2003 menjadi Rp 1.644.289,23 juta, selanjutnya pada tahun 2004 menjadi Rp 1.811.553,74 juta dan pada tahun 2005 meningkat lagi menjadi Rp 1.962.127,97 juta (BPS, 2006).

Di Kabupaten Aceh Besar sekarang telah ada 8 LKM yang ikut serta dalam memberdayakan

* Korespondensi Pengarang:

Program Studi Ekonomi Pembangunan Fakultas Ekonomi Universitas Malikussaleh
Kampus Utama Cot Tengku Nie Reuleut, Muara Batu, Aceh Utara
E-mail: tala.murtala@gmail.com

UMKM. Lembaga keuangan mikro berperan penting terhadap perkembangan UMKM di Kabupaten Aceh Besar karena hampir sebahagian besar pekerja adalah wiraswasta yang terlibat dalam kegiatan ekonomi informal, yang sangat tergantung terhadap sektor UMKM. Oleh karena itu, pengembangan sektor UMKM menjadi faktor penting dalam pengembangan ekonomi di Kabupaten Aceh Besar. Guna memberdayakan kembali perekonomian di Kabupaten Aceh Besar, khususnya sektor UMKM, perlu dilakukan pembenahan secara menyeluruh, baik di sisi penyedia jasa keuangan dalam hal ini lembaga keuangan mikro maupun di sisi penerimanya yakni UMKM.

Winardi (2002 : 181) mendefinisikan industri sebagai suatu usaha produktif, terutama dalam bidang produksi atau perusahaan tertentu yang menyelenggarakan jasa-jasa. Misalnya transportasi yang menggunakan modal dan tenaga kerja. Menurut BPS "Industri Kecil adalah usaha yang melakukan kegiatan mengubah barang dasar menjadi barang jadi/setengah jadi dan atau barang yang kurang nilainya menjadi barang yang lebih tinggi nilainya dengan jumlah tenaga kerja 5-19 orang. Bila tenaga kerjanya antara 20-100 orang disebut usaha sedang dan lebih dari 100 orang disebut usaha besar.

Pengertian Industri Kecil menurut Tugiman (2005:6) perlu adanya beberapa pendekatan untuk membuktikan suatu usaha tergolong kedalam usaha kecil. Pendekatan-pendekatan tersebut yaitu : pendekatan tenaga kerja , pendekatan omzet dan assets, dan pendekatan asset. Undang-undang No 9 tahun 1995 tentang Industri Kecil memberikan pengertian Industri Kecil sebagai suatu kegiatan ekonomi rakyat yang berskala kecil dan memenuhi kriteria kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan serta kepemilikannya sebagaimana diatur undang-undang ini, pasal 1 ayat 2 yang berbunyi: "memiliki kekayaan bersih paling banyak Rp 200.000.000 (Dua Ratus juta rupiah), tidak termasuk tanah dan tempat usaha; atau Memiliki hasil penjualan tahunan paling banyak Rp. 1.000.000.000 (Satu milyar Rupiah;Milik warga negara Republik Indonesia. Berdiri sendiri, bukan merupakan anak perusahaan atau cabang langsung maupun tidak langsung dengan usaha menengah atau usaha besar; Berbentuk usaha perseorangan, usaha yang tidak berbadan

hukum, berbadan hukum yang tidak termasuk koperasi."

Badan Pusat Statistik (BPS, 1998: 71) memberikan pengertian tentang Industri Kecil yaitu usaha yang melakukan kegiatan usaha mengubah barang dasar menjadi barang setengah jadi/barang jadi atau barang yang kurang nilainya menjadi barang yang lebih tinggi nilainya, dengan jumlah tenaga kerja 5-19 orang.

Dilihat dari berbagai kriteria, suatu industri dapat diklasifikasikan ke dalam tingkatan-tingkatan tertentu. Secara umum penggolongan industri didasarkan pada kriteria-kriteria fisik yaitu banyak modal yang digunakan serta jumlah karyawan atau tenaga kerja yang diperkerjakan dalam kegiatan industri tersebut, baik dengan menggunakan mesin maupun tanpa menggunakan mesin.

Hadi (1995 : 20), mengategorikan industri ke dalam tiga ukuran yaitu, (1) Industri besar yaitu industri yang mempekerjakan buruh 100 orang atau lebih tanpa menggunakan mesin atau industri yang mempekerjakan buruh 50 orang atau lebih tetapi menggunakan mesin; (2) industri sedang yaitu industri yang mempekerjakan buruh 10 sampai 99 orang tanpa menggunakan mesin atau mempekerjakan 5 sampai 49 orang dengan menggunakan mesin; dan (3) industri kecil yaitu industri yang mempekerjakan buruh 1 sampai 9 orang tanpa menggunakan mesin atau industri yang mempekerjakan buruh 1 sampai 4 orang dengan menggunakan mesin.

Menurut definisi yang dipakai dalam *Microcredit Summit* (1997), kredit mikro adalah program pemberian kredit berjumlah kecil yang diberikan bagi warga paling miskin untuk membiayai proyek yang dia kerjakan sendiri agar menghasilkan pendapatan, yang memungkinkan mereka peduli terhadap diri sendiri dan keluarganya. Sedangkan Bank Indonesia mendefinisikan kredit mikro merupakan kredit yang diberikan kepada para pelaku usaha produktif baik perorangan maupun kelompok yang mempunyai hasil penjualan paling banyak Rp 100 juta per tahun. Sementara di BRI, keuangan mikro didefinisikan sebagai pelayanan kredit di bawah Rp 50 juta (Wijono, 2005: 90). Lembaga keuangan mempunyai fungsi sebagai intermediasi dalam aktifitas suatu

perekonomian. Jika fungsi ini berjalan baik, maka lembaga keuangan tersebut dapat menghasilkan nilai tambah. Banyaknya jenis lembaga keuangan mikro yang tumbuh dan berkembang di Indonesia menunjukkan bahwa lembaga keuangan mikro sangat dibutuhkan oleh masyarakat, terutama kelompok masyarakat berpenghasilan rendah, pengusaha kecil dan mikro yang selama ini belum terjangkau oleh jasa pelayanan keuangan perbankan khususnya bank umum. Pada lembaga keuangan mikro ini dapat menumbuhkan minat masyarakat terutama di pedesaan untuk berusaha atau menumbuhkan pengusaha-pengusaha kecil, yang pada akhirnya dapat membantu program pemerintah untuk meningkatkan produktivitas usaha masyarakat kecil di pedesaan, meningkatkan pendapatan pen-duduk desa, menciptakan lapangan kerja baru di pedesaan, serta menunjang program pemerintah dalam mengupayakan pemerataan pendapatan penduduk desa dan upaya pengentasan kemiskinan (Rudjito, 2003).

Kabupaten Aceh Besar merupakan salah satu kabupaten di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam, memiliki luas wilayah 2.974,12 km² dengan jumlah penduduk sebesar 263.403 jiwa di tahun 2004, yang tersebar di 22 kecamatan. Sumber utama penghasilan penduduknya adalah sebagai petani, dengan mengarap tanaman pangan. Disegi taraf dan pola konsumsi penduduknya, lebih besar untuk mengkonsumsi bahan makanan sebesar 64,76 persen dan 35,24 persen untuk mengkonsumsi non-makanan dari pengeluarannya (BPS.2004). Hal tersebut merupakan kategori penduduk miskin, jumlah penduduk miskin di Kabupaten Aceh Besar yaitu, sebesar 89.646 jiwa di tahun 2003 dan 91.576 jiwa di tahun 2004, keadaan ini mengalami peningkatan sebesar 1.930 jiwa atau 97,892 persen di tahun 2004. Dengan jumlah penduduk miskin demikian, Kabupaten Aceh Besar berada pada tingkat nomor 5 dari urutan Kabupaten-Kabupaten yang memiliki penduduk miskin di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam.

Tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh modal usaha Lembaga Keuangan Mikro terhadap volume usaha kecil di Aceh Besar. Dari latar belakang dan landasan teoritis serta penelitian terkait yang telah dikemukakan sebelumnya, maka dapat dibuat suatu hipotesis dalam

penelitian ini yaitu modal usaha dari Lembaga Keuangan Mikro berpengaruh signifikan terhadap volume usaha kecil di Aceh Besar.

METODE PENELITIAN

Ruang Lingkup Penelitian

Penelitian ini dilakukan di kabupaten Aceh Besar, untuk mengetahui pengaruh modal usaha Lembaga Keuangan Mikro terhadap volume usaha kecil di Aceh Besar maka variabel dalam penelitian ini dibatasi hanya variabel jumlah dana yang disalurkan oleh lembaga keuangan mikro yang merupakan modal usaha bagi usaha kecil dan variabel volume usaha kecil di kabupaten Aceh Besar dari tahun 2000-2007.

Sumber Data

Data yang digunakan di dalam penelitian ini adalah data sekunder, yaitu total dana yang disalurkan Lembaga keuangan Mikro kepada Usaha kecil dan total penerimaan Usaha kecil yang diperoleh dari Badan Pusat Statistik Kabupaten Aceh Besar, Departemen Perindustrian dan Perdagangan, dan instansi terkait lainnya yang berkaitan dengan topik skripsi ini. Data yang dianalisis adalah dari tahun 2000 sampai tahun 2007.

Model Analisis Data

Untuk mengetahui pengaruh modal terhadap penerimaan sektor usaha kecil di Aceh Besar periode 2000-2007 maka dilakukan dengan menggunakan regresi linear sederhana menurut Gujarati, (1999:24) sebagai berikut:

$$Y = \alpha + \beta X + e_i$$

di mana:

Y = Dependent variable

α = Intercept

β = Koefisien regresi

X = Independent variable

e_i = Faktor pengganggu

Kemudian model tersebut diformulasikan ke dalam model sebagai berikut:

$$V = a + bM + e_i$$

di mana :

V = Volume usaha

a = Intercept

b = Koefisien regresi dari variabel modal usaha

M = Variabel modal usaha

e_i = Variabel pengganggu

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pengaruh Modal Usaha Lembaga Keuangan Mikro Terhadap Volume Usaha kecil Di Aceh Besar

Untuk menganalisis pengaruh kredit kelayakan usaha terhadap kelangsungan usaha kecil di Kabupaten Aceh Besar akan dianalisis dengan

menggunakan analisis Regresi Linear Sederhana, dimana yang mejadi variabel dependen dalam penelitian ini adalah keuntungan usaha kecil, dan variabel independen yaitu modal usaha untuk usaha kecil, hasil perhitungan akhir adalah sebagaimana ditampilkan pada Tabel 1.

Tabel 1. Hasil Perhitungan Regresi

Keterangan	Nilai		Sig
R Korelasi	0,938		
R Square	0,881	F-hitung	
Adjusted R Square	0,861	44,250	
Constanta	-91,419	T-hitung	0,004
Koefisien regresi volume usaha	9,437		0,001
		6,652	

Sumber Hasil Pengolahan Data (diolah), 2007

KESIMPULAN

Perkembangan saluran dana dari Lembaga keuangan Mikro kepada usaha kecil di Kabupaten Aceh Besar pada tahun 2000 mencapai 13,24 milyar rupiah. Pada tahun 2001 meningkat sebesar 15,25 persen atau sebesar 13,41 milyar rupiah, sampai tahun 2007 mencapai 14,98 milyar, fenomena ini memberikan gambaran bahwa perhatian pemerintah terhadap perkembangan usaha kecil di Kabupaten Aceh Besar semakin besar sehingga harus diberdayakan.

Perkembangan volume usaha dari usaha kecil di Kabupaten Aceh Besar pada tahun 2000 sebesar Rp. 30,143 milyar. Pada tahun 2001 meningkat menjadi Rp. 35,251 milyar, pada tahun 2002 volume usaha kecil di Kabupaten Aceh Besar kembali meningkat sebesar 8,77 persen atau menjadi Rp. 38,34 milyar, volume usaha dari usaha kecil di Kabupaten Aceh Besar terus meningkat sampai tahun 2007 yaitu mencapai Rp. 47,024 milyar.

REFERENSI

- Badan Pusat Statistik. 1994. *Statistik Industri Kecil*. Jakarta.
- Badan Pusat Statistik. 1998. *Aceh Dalam Angka*. Banda Aceh.
- Badan Pusat Statistik. 2005. *Indikator Makro Ekonomi*. Nanggroe Aceh Darussalam.

Kakisina, Stephen. 2003. Posisi Strategik Perbankan Mikro dalam Pembiayaan Usaha Mikro Kecil, dan Menengah di Provinsi Papua. *Jurnal Studi Pembangunan Interdisiplin*. Edisi Desember. Vol: 15. No: 3. Hal: 333 – 347.

Rudjito. 2003. Peran Lembaga Keuangan Mikro Dalam Otonomi Daerah Guna Menggerakkan Ekonomi Rakyat dan Menanggulangi Kemiskinan: Studi Kasus Bank Rakyat Indonesia”. *Jurnal Keuangan Rakyat*. Tahun II, No. 1 Maret 2003.

Tugiman, Hiro. 1995. Peranan Usaha Kecil dan Koperasi dalam Memamfaatkan Sisa Laba BUMN. Jakarta: Jakarta

UU RI No. 9 Tahun 1999 Tentang Usaha Kecil. Direktorat Jendral Pembinaan Pengusaha Kecil.

Winardi. 1992. Beberapa Aspek Industri Dalam Pembangunan Regional. *Prisma*, No.5. LP3ES, Jakarta.

Wijono, Wiloejo Wirjo. 2005. “Pemberdayaan Lembaga Keuangan Mikro Sebagai Salah Satu Pilar Sistem Keuangan Nasional: Upaya Konkrit Memutus Mata Rantai Kemiskinan”. *Kajian Ekonomi dan Keuangan*. Edisi Khusus November 2005.